

Forum Freedom 46, 03 April 2006

Tema: Potret Demokrasi di Indonesia

Nara sumber : State Building, konteks Indonesia

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

Hamid Basyaib (HB). Selamat pagi, saudara. Anda berjumpa lagi dalam Forum Freedom bersama saya, Hamid Basya'ib. Ini acara yang disponsori oleh *Freedom Institute* bekerja sama dengan KBR 68 H yang dipancarkan ke sekitar 50 radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini adalah D. Luthfi Asy-Syaukani. Selamat pagi bung Luthfi?

Luthfi Assyaukanie (LA). Selamat pagi bung Hamid.

HB : Dia baru saja selesai di Universeitas Melbourne dan sekarang adalah direktur eksekutif Religious Reform Project (Refro) dan juga bekerja di Freedom Institute, selain mengajar di beberapa universitas, antara lain universitas Paramadina. Pagi ini, kita akan bicara satu tema yang belum muncul di permukaan, dalam arti belum diberitakan di koran-koran. Tetapi, ini terkait dengan diskusi yang baru dilakukan Freedom Institute tanggal 28 kemarin. Yaitu, diskusi buku yang dikarang oleh Francis Fukuyama, *State Building*. Akan tetapi, waktu itu yang didiskusikan terjemahannya. Judul terjemahannya, *Memperkuat Negara*. Jadi kita mau bicara bertitik tolak dari buku itu dan kita akan melihat keadaan di Indonesia, mungkin juga perbandingannya dengan negara-negara lain. Nah, saya kira Luthfi mengerti ini, karena kemarin waktu diskusi menjadi moderator dengan pembicara Dr. Saiful Mujani dan dihadiri oleh beberapa orang lain dalam forum itu. Inti dari buku itu, kalau tidak salah, Anda dapat mengorekasi kalau saya salah, adalah, menurut Francis Fukuyama, pemikir teori politik terpenting dewasa ini, negara mestinya kuat, atau memikirkan penguatan dirinya ketimbang memperlebar *scope*, atau memperlebar wilayah yang diurusnya. Betul tidak seperti itu bung Luthfi inti buku Francis Fukuyama ini?

LA : Sebetulnya, sebelum kita berbicara buku itu, kalau kita perhatikan secara kronologis, Fukuyama ini sepertinya mempunyai proyeknya sendiri. Buku ini bukan buku terbaru dia, judul aslinya, seperti Anda katakan, adalah *State Building*. Dia punya dua buku baru lagi. *State Building* ini terbit pada tahun 2003. Buku baru dia (setelah *state building*) adalah *Nation Building* dan yang paling baru, yang akan terbit bulan Maret atau April tahun ini, yaitu *America at the Cross Road* (Amerika di Persimpangan Jalan). Yang menarik dari Fukuyama adalah setelah buku pertamanya, *The End of History*, dia berbicara tiga bukunya yang terakhir. Tiga buku terakhir sebelum *State Building* ini adalah *Trust*, kemudian *Great Disruption*, dan *Our Post Human Future*. Tiga buku ini berkonsentrasi pada pembangunan masyarakat. Dia berbicara tentang modal sosial (*social capital*). Hampir seluruh bukunya sebelum *State Building*, itu berbicara tentang bangunan masyarakat. Sekarang dia berkonsentrasi mendiskusikan tentang pembangunan negara. Setelah bangunan masyarakatnya selesai, kemudian berkonsentrasi pada pembangunan

negara. Nah, ini menarik, menurut Fukuyama, kalau kita kaitkan dengan salah satu kebijakan penting luar negeri Amerika Serikat, yaitu proyek pembangunan negara. Sejak perang dunia kedua, Amerika terobsesi untuk membangun negara, proyek besarnya tentu saja ingin mengeksport demokrasi-liberal yang menurut Fukuyama sudah final. Sebagai sebuah sistem yang baik, ideal, dan ternyata berhasil di negara-negara Barat, bagaimana ini dieksport ke negara-negara lain. Proyeknya adalah pembangunan negara. Nah, ini yang kemudian dia coba formulasikan dalam buku ini. Dan, targetnya adalah beberapa negara di luar Amerika, dan dia contohkan misalnya, sebagian ada yang berhasil. Kalau kita ambil contoh Jerman dan Jepang, itu adalah contoh *State Building* yang berhasil.

HB: yang dibentuk oleh Amerika?

LA: Amerika selalu menjadi pemimpin dalam pembentukan negara di luar Amerika. Dan yang menarik kedua-duanya (Jerman dan Jepang) menganut sistem liberal demokrasi, dan berhasil. Tapi juga ada yang separuh berhasil. Kita ambil contoh, Kosovo atau Bosnia. Tapi juga ada yang gagal. Seperti Somalia dan Haiti, gagal total. Dan ada juga yang sedang dibangun, kita harus menunggu apakah itu gagal atau berhasil. Kita harus menunggu beberapa tahun lagi. Seperti sekarang yang sedang dilakukan oleh Amerika di Afganistan dan Irak. Jadi proyek *State Building* adalah ingin melakukan penerapan sebuah konsep politik, tata politik model Amerika yang sudah berhasil, dan ingin diterapkan di negara-negara lain.

HB: bung Luthfi, kalau Anda bilang Haiti gagal, Somalia gagal, Bosnia belum kelihatan dan beberapa negara lainnya belum kelihatan, Irak jelas sekali belum kelihatan, malahan makin jelas adalah tanda-tanda kehancuran. Apakah Fukuyama membahas apa yang menyebabkan kegagalan? Kenapa di satu negara berhasil, di negara lain gagal?

LA: dia bicara, tentu saja, tentang ada banyak faktor kegagalan. Apa sebab-sebab kegagalan dan sebab-sebab keberhasilan. Tapi yang paling penting, dia menggunakan dua istilah yang menjadi kerangka toerinya: dia sebut sebagai *Scope* atau cakupan dan *streight* atau kekuatan. Nah, kegagalan pembangunan negara menurut dia adalah kegagalan dalam mengurai kedua dimensi ini dalam kenegaraan. Yaitu kegagalan dalam, misalnya pembangunan negara terlalu ditekankan pada aspek *scope*, pada aspek cakupan.

HB: artinya negara mau mengurus banyak hal?

LA: Tepat sekali. Negara sangat terobsesi untuk mengurus banyak hal sehingga dia kedodoran untuk memperkuat dirinya sendiri. Dalam konsep negara liberal, yang ingin ditekankan adalah bahwa negara sebagai penjaga anjing malam saja, sebagai pemadam kebakaran lah.

HB: *the best government is the list government.*

LA: Jadi, karena terlalu terkonsentrasi pada cakupan sehingga negara itu lemah. Dan di sanalah kemudian ada fenomena gagal negara (*state failure*).

HB: Lalu kalau kita mau lihat ini dalam konteks Indonesia, apakah menurut Anda konstitusi kita memungkinkan? Sekarang kita konsentrasikan dalam *streight* dan *Scope* ini. Karena itulah inti dalam buku yang sedang kita bicarakan ini, yaitu *Memperkuat Negara*. Jadi sekali lagi intinya, negara itu mestinya kuat atau terus memperkuat diri sambil terus mengurangi cakupannya. Jadi misalnya, hal-hal yang tidak perlu diurus negara, lepaskan saja pada swasta atau masyarakat. Negara cukup saja misalnya mengurus angkatan bersenjata yang harus kuat. Kemudian juga birokrasi harus kuat. Jadi kalau mengurus apa-apa, efisien dan cepat. Sementara wilayah yang diaturnya sendiri sedapat mungkin semakin kecil. Nah, sekarang kalau kita benturkan dengan Indonesia, apakah prinsip *scope* dan *streight* ala Fukuyama cocok atau sejalan dengan amanat konstitusi kita yang kelihatannya banyak sekali mengamankan *scope* yang melebar?

LA: Saya kira kita juga harus melihat sejarah pembangunan negara kita. Dan apa yang kita warisi sekarang adalah warisan lama. Kita tahu bahwa pembangunan negara kita dimulai pada pertengahan tahun 40-an. Tahun 45 merupakan awal perang dingin. Dan di sana ada tarik menarik antara, kita sebut saja, kekuatan sosialisme dan kekuatan kapitalisme-liberalisme. Dan kita berusaha menjadi jalan tengah. Karena itu kita menjadi salah satu *pioneer* dalam gerakan non-Blok. Yang ingin saya katakan adalah bahwa secara konstitusi mungkin kita masih cenderung terobsesi dengan cakupan atau *scope*. Dan karena itu, kalau kita tarik ke konteks kontemporer sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan yang mestinya diatur oleh swasta, masih diatur oleh negara. Dan ini menjadi relevan misalnya kalau kita tarik ke era Orde Baru tahun 80an misalnya: ada gerakan, di dalam ekonomi, deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan lain-lain. Ini sebetulnya ingin mengurangi peran negara yang begitu banyak di dalam mengatur persoalan-persoalan yang mestinya tidak diatur. Kalau tarik lagi dalam konteks sekarang setelah era reformasi, saya melihat bahwa masyarakat diberi kebebasan dan sebagian kelompok justru terobsesi memaksimalkan kembali fungsi negara. Kalau kita mau tarik ke isu yang paling berkembang sekarang adalah misalnya isu tentang RUU APP. Sebuah kelompok masyarakat yang ingin menugasi negara yang berkaitan dengan urusan-urusan moral misalnya. Yang mestinya bukan urusan negara. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh bahwa kita masih sangat disibuki dengan urusan-urusan *scope* dengan mengabaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan *streight*. Kalau kita ambil contoh yang riil misalnya, kinerja polisi masih sangat lemah. Polisi dan keamanan itu bagian dari *streight*, kekuatan. Kita lihat bagaimana cara pengamanan di Irian Jaya baru-baru ini. Kelihatan sekali bahwa aparat keamanan sangat lemah. Ini kelihatan sekali, di dalam faktor *streight* abai, tetapi kita masih terkonsentrasi dalam soal memperlebar cakupan.

HB: Oke nanti kita akan lanjutkan, karena kita harus *break* terlebih dahulu. Saudara, Anda masih bersama Forum Freedom, bersama saya Hamid Basya'ib dan kita akan kembali setelah yang satu ini.

IKLAN

HB: Selamat pagi. Anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom tamu saya Dr. Luthfi Asy-Syaukani. Luthfi tadi bicara pentingnya negara memperkuat

diri, *streight* dan mengurangi cakupan, *scope*. Dia tadi bilang ada kecenderungan masyarakat kita justru semakin menyerahkan banyak urusannya pada negara. Padahal yang ideal adalah makin sedikit bidang-bidang kehidupan yang diurus oleh negara sehingga negara bisa berkonsentrasi memperkuat dirinya dalam hal menegakkan hukum atau meregulasi banyak bidang. Jadi fungsinya regulator saja. Misalnya dalam bisnis, mestinya negara tidak ikut dagang. Sekarang ini negara masih dagang dalam bentuk memiliki badan-badan usaha negara misalnya, sampai 160 lebih jumlahnya. Bung Luthfi apakah betul Anda melihat itu? Anda tadi menyebut soal UU Pornografi, yang kelihatannya adalah desakan masyarakat. Intinya sebetulnya masyarakat meminta negara ikut juga mengurus mislanya, soal *puser* yang terbuka, pakaian yang wajar, jangan pakai rok mini dan sebagainya. Ini pertanda apa? Apakah masyarakat ini belum dewasa atau merasa dirinya tidak mampu, belum tentu betulan, mengurus dirinya sendiri sehingga semua minta diurus oleh negara?

LA: Saya kira mungkin sebagian datang dari cara berpikir kita tentang konsep negara. Kalau kita berbicara tentang konsep negara, kita berbicara filsafat politik. Nah, di sebagian negara-negara non Barat, atau negara-negara yang telah menerapkan sistem liberal demokrasi, terlalu terobsesi atau berharap dengan negara untuk berperan mengurus banyak hal. Masyarakat merasa bahwa negara mampu mengurus berbagai urusan mereka.

HB: Dan sebaliknya, tanpa diurus oleh negara masyarakat merasa tidak mampu menyelenggarakan kehidupannya sendiri?

LA: Iya. Ada perasaan bahwa tanpa negara akan terjadi *ceos*, bentrokan. Jadi, betul-betul semuanya ingin diatur negara. Konsep dasarnya itu.

HB: Apakah di negara Barat yang Anda bilang sudah maju memang kecenderungannya sebaliknya?

LA: Sebetulnya kalau kita mau melihat perdebatan filsafat politik, beragam sekali. Artinya, konsep *minimal state* atau negara minimal, itu bukan konsep yang muncul tiba-tiba, tapi merupakan perdebatan yang panjang. Kalau kita mencoba tarik ke perdebatan filsafat politik, ada dua kelompok besar. Ada kelompok yang menginginkan sebagai model *maximal state*, negara maksimal, yang biasanya didukung oleh kelompok-kelompok yang berkecenderungan kiri atau marxis, atau sosialis, di mana negara memberikan perlindungan perlindungan dan proteksi. Saya kira bentuk yang masih berlaku sekarang adalah konsep *welfare state*, atau negara kesejahteraan, yang juga sebetulnya diterapkan di beberapa negara liberal, seperti Australia. Juga di negara-negara skandinavia. Dan, saya kira, di sana ada semacam *trade of* antara agenda kaum kapitalis-liberal dan kaum sosialis, atau kaum buruh di dalam bentuk partainya. Nah, kaum buruh ini kelompok yang ingin negara tetap melakukan proteksi, menerapkan sistem *welfare state*.

HB: Proteksi, maksudnya proteksi ekonomi. Artinya, pengusaha nasional dilindungi dari serbuan barang-barang impor.

LA: Iya, itu ciri yang khas. Jadi, secara umum konsep *maximal state*, atau negara maksimal didukung oleh kalangan yang biasa kita sebut sebagai kelompok kiri atau kalangan sosialis. Sementara, konsep negara minimal adalah konsep yang datang dari kaum liberal-demokrat. Saya ingin menyebut nama yang sangat ekstrim, yaitu Robert Nozick, yang menggagas konsep *minimal state*. Menurut dia, secara ekstrim dia mengatakan, negara itu seharusnya berfungsi mencetak uang dan membangun institusi keamanan saja, lainnya serahkan pada masyarakat.

HB: Atau begini, kalau pun masyarakat belum mampu pada saat sekarang, nanti juga akan mampu kalau terus dipaksa untuk mengurus dirinya sendiri?

LA: Saya kira demikian.

HB: Cuma masalahnya bung Luthfi, masyarakat banyak berpendapat kalau begitu fungsi negara itu apa kalau cuman minimal? Untuk apa bayar pajak? Lalu siapa yang melindungi dan sebagainya?

LA: Fungsi negara yang paling penting adalah menjaga keamanan. Dan *memprovide* atau memberikan institusi-institusi dan aturan-aturan agar rakyat bekerja. Jadi aturan sendiri bukan datang dari negara begitu saja. Ada prosedurnya lewat parlemen dan kemudian ada kesepakatan dengan pemerintah. Maksud saya adalah bahwa fungsi negara itu sebagai regulator, mengatur hal-hal yang dapat memudahkan masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Ini poinnya. Jadi bukan berarti bahwa negara minimal itu betul-betul absen dari urusan masyarakat. Tapi dia menjadi fasilitator terhadap kepentingan-kepentingan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kalau itu saja diurusi, sudah besar sekali.

HB: Nah, kembali ke kasus Indonesia yang paling riil. Sudah banyak kritik bahwa negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan perairan. 70-80 % negara kita ini terdiri dari air. Lalu etnisitasnya 300an lebih. Pokoknya kita semua tahu data-data yang menunjukkan bahwa Indonesia ini negeri luar biasa dari segi apapun. Dan karena itu juga menyajikan masalah yang luar biasa yaitu dari segi *managament*, dari segi kemampuan mengelola. Nah, kelihatannya memang, dilihat dari kondisi obektif ini, mau tidak mau negara mestinya, kembali ke Fukuyama, lebih memikirkan *streight*-nya dari pada terus mengurus *scope* yang memang luar biasa jejantik, yang tidak mungkin diatasi.

LA: Betul. Dan, meskipun tidak otomatis, itu seperti sebuah konsekuensi, hubungan konsekuensial. Jadi, negara yang terlalu peduli terhadap *scope*, biasanya lemah, kedodoran. Karena konsentrasinya terlalu besar. Sehingga tidak sanggup lagi memerkuat dirinya. Nah, aspek yang paling jelas dalam kasus Indonesia adalah soal keamanan. Sekarang ini betapa hidup kita tidak aman. Jadi fungsi keamanan, polisi dan lain-lain betul-betul lemah sekali. Karena, kita terlalu bnyak sekali yang diurusi. Misalnya RUU APP yang kita sebut tadi menambah pekerjaan, padahal pekerjaan lainnya belum tertangani dengan beres.

HB: Itu Anda baru berbicara Kamtibmas, belum ke bidang pertahanan, sebagai fungsi negara juga.

LA: Iya. Itu lebih kompleks lagi.

HB: Dan banyak sekali negeri kita ini titik yang sangat lemah. Sampai sekarang mislanya selat malak itu masih penuh dengan perampok, (padahal) sudah 600 tahun.

LA: Dan misalnya problem pulau-pulau yang diambil oleh tetangga kita, akan terjadi terus. Begitupun dengan pulau-pulau kosong: ada sekitar 16.000 pulau kita.

HB: Nah, sekarang begini bung Luthfi, saya melihat otonomi daerah itu sejenis pengurangan *scope* dalam konteks pemerintah pusat. Kecenderungannya mestinya begitu wewenang dilimpahkan ke pemerintah daerah, pemerintah daerah selanjutnya tidak perlu mengambil itu. Artinya, *scope* dia dalam konteks daerah masing-masing dikurangi. Nah, ini justru keadaannya masih terbalik. Dari pihak pusat sudah didelegasikan, tetapi di pihak daerahnya justru sedang memperlebar *scope*.

LA: Jadi, daerah sekarang menjadi replika pemerinah pusat. Daerah hanya mencontoh saja sebetulnya. Kita ambil contoh lagi-lagi mislanya, perundang-undangan: Kasus Tangerang atau Banten secara keseluruhan. Itu merupakan replika atau bentuk mini dari kesibukan negara di tingkat pusat. Atau ada yang mengatakan, jangan-jangan, ini adalah *breakdown* atau penguraian dari fungsi negara di tingkat pusat. Dan di tingkat regional atau daerah tinggal meneruskan saja, tinggal memfotokopi apa yang terjadi di tingkat pusat.

HB: Saya ingin kembali pada sinyalemen yang Anda sebutkan tadi bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk menyerahkan urusan yang mestinya menjadi urusannya sendiri. Anda bisa tidak mengatakan, apa konsekuensi dari sikap semacam ini?

Luthfi : kalau kita lihat mislanya memakai perspektif komparatif politik, dengan membandingkan dengan negara-negara lain sekarang ini. Ada kecenderungan bahwa negara-negar yang menerapkan konsep negara maksimal, kalau bukan gagal, sulit sekali untuk maju. Semenatara, negara-negara yang efisien, yang berusaha meminimalisir fungsinya adalah negara-negara yang berhasil dan sukses. Kenapa ini tidak kita jadikan sebagai contoh. Contoh yang paling ekstrim adalah kegagalan Unisoviet. Unisoviet adalah bentuk ekstrim dari kegagalan *maximal state*. Dan itu jelas gagal.

HB: *scope*-nya lebar, *streight*-nya kedodoran.

LA : meskipun ada *streight*-nya mungkin. Akan tetapi, itu hanya dalam satu aspek saja. Tetapi kegagalan Unisoviet adalah kegagalan yang tak terbantahkan. Bahwa negara yang mengatur begitu banyak, akhirnya gagal dalam melakukan fungsinya. Dan saya kira Unisoviet atau ideologi Marxisme bukan satu-satunya. Ada ideologi-ideologi lain yang basisnya bukan marxisme yang sekular yang punya kecenderungan menerapkan negara maksimal. Ada beberapa ideologi yang kecenderungannya seperti itu. Dan menurut saya, kalau kita bandingkan akan bernasib sama. Beberapa contoh saja mislanya, saya sebut di

beberapa negara yang ingin menerapkan ideologi Islam. Sebetulnya dasar negara yang hendak ditegakkan adalah berbentuk maksimalis juga, ingin mengatur segala urusan, dari ujung rambut hingga ujung kaki masyarakatnya. Kita lihat kegagalan Sudan, Taliban, Pakistan ketika di bawah rezim Ziaul Haq. Jadi negara yang maksimal cenderung gagal.

HB: Selain negara komunis seperti Kuba?

LA: Maksud saya, persoalannya bukan masalah ideologi. Tapi sangat praktis, bagaimana mengatur negara. Jadi urusan yang rasional. Urusan negara adalah urusan yang rasional semata. Mau ideologinya apa, menjadi tidak penting. Yang penting adalah prinsip dalam memenej negara yang harus ditekankan. Terlepas dari ideologinya.

HB : sayang sekali waktu kita habis. Bung Luthafi terima kasih atas kehadiran Anda di studio kita pagi ini. Saudara sekalian demikianlah Forum Freedom berakhir, bersama saya Hamid Basya'ib dan kita akan berjumpa minggu depan pada waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan komentar ke 021 70497497, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan, wassalam.....